**Memastikan**

**Perencanaan dan Penganggaran Desa**

**Responsive gender**

 **Pengantar**

**PROSES PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Proses perencanaan penganggaran dan pertanggungjawaban desa ini berlandaskan pada UU Desa nomor 6 tahun 2014 yang diterjemahkan lebih lanjut dalam PP 43 tahun 2014. Lebih lanjut secara teknis, perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban dapat dilihat dalam Permendagri 114/2014 tentang pedoman pembangunan desa dan Permendagri 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Ketentuan tentang keterlibatan perempuan dan kelompok minoritas sesungguhnya sudah jelas termaktub dalam peraturan perundang-undangan itu. Diantaranya di Permendagri 114/2014 dalam pasal 8 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa: (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **mengikutsertakan perempuan**. Pasal 15: Penggalian gagasan dalam penyusunan RPJMDesa **melibatkan perempuan**. Pasal 25: musrenbang RPJMDesa. Musrenbang RKPDesa juga **melibatkan perempuan.**

Atas dasar itulah memastikan seluruh kelompok bisa terwakili dalam proses perencanaan dan penganggaran serta terlibat dalam proses pertanggungjawaban, tidak bisa dibaikan.

Proses perencanaan penganggaran

|  |  |
| --- | --- |
| KEGIATAN | BULAN |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| Musrenbangdes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan RKP Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan APB Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laporan realisasi APBDes semester 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laporan realisasi APBDes semester 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*)Proses penyusunan RPJMDes dilakukan setelah kepala desa terpilih.

Mengacu pada Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa (pasal 31 (1) dan (2) bahwa musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa (RKP) dan Daftar Usulan RKP Desa. Musdes dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Agenda yang dibahas antara lain mencermati ulang dokumen RPJMDesa, MEMBENTUK TIM VERIFIKASI sesuai jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan Hasil pembahasan akan dituangkan dalam berita acara yang dijadikan dasar bagi pemerintah desa untuk menyusun RKP Desa

**STRUKTUR PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Proses perencanaan dan penganggaran serta pertanggungjawaban, bukanlah prosesyang terpisah satu dengan yang lain. Penganggaran akan ditentukan oleh perencanaan yang ada, demikian juga pertaggungjawabannya akan diakuakan berbasis perencanaan dan penganggaran yang ada.

Dokumen dokumen inilah yang harus dicermati dan dibaca dalam perencanaan dan penganggaran desa.:

1. Perencanaan jangka menengah 6 tahun kan menghasilkan RPJMdesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
2. RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang akan menjadi rujukan rencana tahunan
3. APBdesa yang berisi besaran anggaran atas program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPDesa.
4. Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang terdiri dari beberapa rencana yang akan direalisasikan tahun depan.
5. **PERENCANAAN**
	1. **PROSES PERENCANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)**

Rencana jangka mengengah ini digunakan sebagai acuan dalam membuat rencana tahunan. Desa harus memiliki rencana jangka menengah ini untuk menerjemahkan visi misi kepala desa dan mensinkronisasi rencana pembangunan kabupaten dan desa.

**1.2. RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

Sering disebut RKPD merupakan rencana kerja tahunan yang menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk melakukan kerja kerjanya.

1. **PENGANGGARAN**

Keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 tahun 2014. Permendagri ini merupakan turunan dari PP 43 tahun 2014 yang merupakan aturan turunan dari UU Desa nomor 6 tahun 2014.

Permendagri ini memastikan agar keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Keuangan desa tidak bisa hanya dilihat sebagai suatu kegiatan tahunan tetapi masyarakat perlu memastikan **fungsi anggaran:**

1. **Fungsi Manajemen**

**Perencanaan** 🡪 APBDesa merupakan perwujudan komitmen perencanaan desa yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana tahunan (RKPDesa). Komitmen ini dilihat dari jumlah rupiah yang dialokasikan dan dituliskan dalam APBDesa

**Kontrol** 🡪 dokumen APBDesa adalah sarana untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun. Melalui dokumen APBDesa inilah maka masyarakat bisa mengontrol pengalokasian dana untuk pemenuhan hak warga (terkait dengan kegiatan yang menyasar

**Pertanggungjawaban** 🡪 Melalui dokumen APBdesa inilah maka pertanggungjawaban akan dilakukan oleh pemerintah desa. Warga bisa mengecek dokumen APBdesa dengan pertanggungjawaban desa

1. **Fungsi Fiskal**
* ***Alokasi*** 🡪 APBdesa untuk memastikan berapa alokasi untuk aparatur, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan
* ***Distribusi*** 🡪 untuk memastikan APBdesa di distribusikan hanya untuk 1 kelompok tertentu atau seluruh warga terutama kelompok marginal (perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat miskin) mendapatkan anggaran yang memadai.
* ***Stabilisasi*** 🡪 APBdesa selayaknya digunakan untuk memastikan adanya anggaran yang disediakan untuk mengatasi hal-hal/ peristiwa yang mendadak atau *emergency* yang tidak direncanakan sejak awal.

|  |
| --- |
| Pastikan: 1. Ada keterkaitan APBDesa dengan dokumen perencanaan tahunan RKPdesa dan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMDesa)
2. Bahwa lokasi pelaksanaan kegiatan tidak terkumpul menjadi satu. Ada distribusi yang adil ke seluruh wilayah yang ada di desa terutama wilayah yang jauh dari akses layanan dasar (layanan pendidikan/sekolah, layanan kesehatan/puskesmas)
3. Alokasi yang memadai untuk pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat miskin
 |

**pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBdESA**



(Sumber: sukasmanto, IRE, siklus perencanaan dan penganggaran desa, 2017 (diolah dari permendagri 13 tahun 2014))

|  |
| --- |
| Kepala desaPemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desaSekretaris desaKoordinator pelaksana teknis pengelola keuangan desa (PTPKD)Kepala seksi Pelaksana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desaKepala seksi Pelaksana kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat desa |

**Kewenangan kepala desa**

* Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa dan menetapkan pelaksana teknis pengelola keuangan desa (PTPKD)
* Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
* Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
* Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBdesa

**Apa yang dilakukan warga**

|  |  |
| --- | --- |
| **proses** | **Yang bisa dilakukan warga** |
| Perencanaan  | * Memastikan masalah kelompok marginal tercantum dalam dokumen perencanaan
* memastikan masalah kelompok marginal menjadi masalah prioritas yang harus diselesaikan oleh desa
* memastikan pagu indikatif anggaran dalam rencana kerja pemerintah desa(tahunan)
 |
| penganggaran | * Memberikan masukan tentang APBDesa kepada BPD
* Mengikut public hearing tentang APBDesa
 |
| Pelaksanaan  | * Kepala desa bersama kepala seksi, menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDesa
* Memberikan masukan terkait perubahan APBDesa
 |
| penatausahaan | Meminta informasi, memberikan masukan, melakukan audit partisipatif |
| pertanggungjawaban | Meminta informasi, mencermati LPJ, bertanya meminta penjelasan terkait LPJ |

* 1. **PROSES PENGANGGARAN**

**TAHAP PERENCANAAN ANGGARAN**

Dibawah ini adalah alur bagaimana APBdesa dibuat sampai menjadi dokumen APBdesa yang bisa diakses oleh warga (termasuk kelompok perempuan, masyarakat miskin dan penyandang disabilitas)



**Siapa yang terlibat, apa saja bahan yang harus disediakan dan bagaimana pelaksanaan dalam setiap prose situ dilakukan?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Langkah** | **Penyusunan RAPBDesa**  | **Musdes RAPBDesa**  | **Pembahasan dan Persetujuan Bersama**  | **Penetapan APBDesa**  |
| Pelaku | Disusun oleh Pemerintah Desa  | Dilaksanakan oleh BPD  | Oleh BPD bersama Pemerintah Desa  | Evaluasi Camat  |
| Bahan | Bahan utama : RKPDesa | Materi : RAPBDesa  | Bahan : RAPBDesa berdasarkan hasil Musdes  | Ditetapkan dengan Peraturan Desa  |
| pelaksanaan | Pemdes bisa mengikutsertakan BPD | Bisa mengundang perwakilan masyarakatBPD menyepakati perdes APBDes | Diskusi publik digelar oleh pemdes. Mengundang perwakilan masyarakat.Kesempatan bagi desa untuk mendapatkan masukan Perwakilan Warga  | * Publikasi dan sosialisasi perdes tentang APBDesa
* Dipasang didepan umum (bisa dilihat oleh banyak orang)
 |

|  |
| --- |
| **Dimana kelompok marginal (perempuan, masyarakat miskin dan penyandang disabilitas berpartisipasi dan mengakses penyusunan APBdesa**1. Pastikan ada perwakilan kelompok marginal terlibat dalam proses pembahasan oleh BPD
2. Pastikan ada undangan publik hearing (dialog publik) terkait RAPBDesa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.
3. Pastikan perwakilan yang hadir membawa usulan kelompok
4. Pastikan dalam pos pembinaan kelompok masyarakat dan pos pemberdayaan masyarakat ada alokasinya.
5. Pastikan ada sosialisasi dan publikasi perdes tentang APBDesa yang bisa dilihat oleh publik.
 |

**TAHAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | SUMBER DANA | DASAR | PENGGUNAAN |
| 1.  | PADesa  | Perbup …..  | Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan, Belanja tak terduga |
| 2.  | Dana Desa  | PP No. 60/2014 jo. PP No. 22/2015Permenkeu No.93/PMK.07 /2015, dan Permendes  | Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan  |
| 3.  | ADD  | PP No. 43/2014 jo. PP No. 47/2015, Perbup No. 1/2015  | Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan, Belanja tak terduga |
| 4.  | Bagi hasil pajak dan retribusi daerah  | PP No. 43/2014 jo. PP No. 47/2015, Perbup tentang pajak dan retribusi daerah | Bidang Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan  |
| 5.  | Bantuan Keuangan Provinsi  | Perbup tentang bantuan keuangan  | Bidang Pemberdayaan, (ekonomi) |
| 6.  | Bantuan padukuhan  | Perbup bantuan keuangan | Bidang Pembangunan (Infastruktur/prasarana padukuhan) |

**Alur pelaksanaan APBdesa dan pengawasan oleh warga**

Penerimaan desa

Pastikan Pastikan tidak ada pendapatan yang tidak dicatat dalam APBdesa

Melalui rekening desa

Pembiayaan biaya tak terduga harus dibuat rincian

Pastikan Pastikan tidak ada pungutan

Didukung bukti dan kelengkapan yang sah

Perdes dibuat setelah RAPBdes ditetapkan

Dilarang melakukan pungutan

Penyimpanan dikas desa sesuai perbub

Penyimpanan di kas desa sesuai perbub

**REKENING KAS DESA**

**Pengajuan pelaksanaan kegiatan**

|  |
| --- |
| **Apa yang perlu dilakukan warga dan kelompok marginal dalam tahapan ini?**1. Pastikan RAB yang diajukan sesuai dengan yang direncanakan oleh kelompok masyarakat
2. Pastikan bahwa pembayaran yang dilakukan bendahara, sesuai dengan RAB yang ada setelah dipotong pajak.
3. Tidak diperbolehkan ada pembayaran kepada petugas (sekretaris desa, kepaladesa, bendahara atau perangkat desa lainnya) / warga tidak boleh membayar petugas.
 |

**Checklist PROSES PENGANGGARAN**

Informan :

Desa :

Tanggal Pengisian :

**PERANGKAT DESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Komponen** | **Kesesuaian** | **Keterangan**  |
| **Ya** | **Tidak** |
| **PROSES PENYUSUNAN APBDesa** |
|  | Apakah sekretaris desa menyampaikan rancangan APBDesa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  |  |  |  |
|  | Apakah seluruh aparat desa terlibat dalam penyusunan Proyeksi Pendapatan Desa, proyeksi belanja dan pembiayaan. |  |  |  |
|  | Apakah RKPDesa menjadi rujukan penyusunan APBDesa |  |  |  |
|  | Apakah penyusunan belanja memperhatikan kebutuhan kelompok perempuan  |  |  | Berapa kegiatan |
|  | Apakah penyusunan belanja memperhatikan usulan kebutuhan kelompok penyandang disabilitas  |  |  | Berapa kegiatan |
|  | Apakah penyusunan belanja memperhatikan usulan kebutuhan kelompok masyarakat miskin  |  |  | Berapa kegiatan  |
|  | Apakah seluruh aparat desa terlibat dalam Proyeksi Pembiayaan Desa |  |  |  |
|  | Apakah seluruh aparat desa terlibat dalam menjabarkan dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB)  |  |  |  |
| **Musdes RAPBDesa** |
|  | Apakah perangkat desa menyiapkan secara teknis musdes yang dilaksanakan anggota BPD |  |  |  |
|  | Apakah Rancangan APBDes menjadi bahan musdes |  |  |  |
|  | Apakah hasil musdes mengevaluasi rancangan APBDesa yang ada |  |  |  |
|  | Apakah ada evaluasi / masukan dari BPD terkait program atau kegiatan untuk kelompok perempuan  |  |  |  |
|  | Apakah ada evaluasi / masukan dari BPD terkait program atau kegiatan untuk kelompok penyandang disabilitas  |  |  |  |
|  | Apakah ada evaluasi / masukan dari BPD terkait program atau kegiatan untuk masyarakat miskin  |  |  |  |
| **Pembahasan dan Persetujuan**  |
|  | Apakah seluruh anggota BPD hadir dalam pembahasan dan persetujuan bersama Kepala Desa |  |  |  |
|  | Apakah ada fokus pembahasan terkait program atau kegiatan untuk perempuan |  |  | Apa yang dibahas |
|  | Apakah ada fokus pembahasan terkait program atau kegiatan untuk penyandang disabilitas |  |  | Apa yang dibahas |
|  | Apakah ada fokus pembahasan terkait program atau kegiatan untuk masyarakat miskin |  |  | Apa yang dibahas |
|  | Apakah mengundang kelompok perempuan untuk melakukan pembahasan |  |  | mengapa |
|  | Apakah mengundang kelompok penyandang disabilitas untuk melakukan pembahasan |  |  | mengapa |
|  | Apakah mengundang kelompok miskin untuk melakukan pembahasan |  |  | mengapa |
| **Evaluasi APBDesa** |
|  | Apakah APBDesa dievaluasi oleh Bupati melalui camat |  |  |  |
|  | Apakah evaluasi terkait dengan alokasi untuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas atau masyarakat miskin |  |  |  |
|  | Apakah evaluasi itu dilaksanakan oleh desa |  |  |  |
| **PENETAPAN APBDesa** |
|  | Apakah penetapan APBDesa dilaksanakan dengan mengundang perwakilan kelompok perempuan |  |  |  |
|  | Apakah penetapan APBDesa dilaksanakan dengan mengundang perwakilan kelompok penyandang disabilitas |  |  |  |
|  | Apakah penetapan APBDesa dilaksanakan dengan mengundang perwakilan masyarakat miskin |  |  |  |
|  | Apakah penandatanganan peraturan desa tentang APBDesa dilakukan dihadapan publik |  |  |  |
|  | Apakah APBDesa yang telah ditetapkan diperlihatkan kewarga secara terbuka di tempat umum |  |  |  |
|  | Apakah APBDesa dipasang dalam website desa |  |  |  |
|  | Apabila warga ingin bertanya tentang APBDesa, diberitahukan cara dan nomor kontak perangkat desa yang bertanggungjawabnya |  |  |  |

**BPD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Komponen** | **Kesesuaian** | **Keterangan**  |
| **Ya** | **Tidak** |
| **PROSES PENYUSUNAN APBDesa** |
|  | Apakah BPD tahu jadwal penyusunan APBDesa |  |  |  |
| **Musdes RAPBDesa** |
|  | Apakah seluruh anggota BPD mengikuti musdes RAPBDesa |  |  |  |
|  | Apakah Rancangan APBDes menjadi bahan musdes |  |  |  |
|  | Apakah BPD merujuk RKPDesa dalam membahas RAPBDesa |  |  |  |
|  | Apakah ada pembahasan khusus terkait program atau kegiatan untuk kelompok **perempuan**  |  |  |  |
|  | Apakah ada pembahasan khusus terkait terkait program atau kegiatan untuk kelompok **penyandang disabilitas**  |  |  |  |
|  | Apakah ada pembahasan khusus terkait terkait program atau kegiatan untuk **masyarakat miskin**  |  |  |  |
| **Pembahasan dan Persetujuan**  |
|  | Apakah seluruh anggota BPD hadir dalam pembahasan dan persetujuan bersama Kepala Desa |  |  |  |
|  | Apakah ada fokus pembahasan terkait program atau kegiatan untuk **perempuan** |  |  | Apa yang dibahas |
|  | Apakah ada fokus pembahasan terkait program atau kegiatan untuk **penyandang disabilitas** |  |  | Apa yang dibahas |
|  | Apakah ada fokus pembahasan terkait program atau kegiatan untuk **masyarakat miskin** |  |  | Apa yang dibahas |
|  | Apakah mengundang kelompok perempuan untuk melakukan pembahasan |  |  | mengapa |
|  | Apakah mengundang kelompok penyandang disabilitas untuk melakukan pembahasan |  |  | mengapa |
|  | Apakah mengundang kelompok miskin untuk melakukan pembahasan |  |  | mengapa |
| **Evaluasi APBDesa** |
|  | Apakah BPD mengetahui hasil evaluasi APBDesa |  |  |  |
| **PENETAPAN APBDesa** |
|  | Apakah penetapan APBDesa dilaksanakan dengan mengundang perwakilan kelompok perempuan |  |  |  |
|  | Apakah penetapan APBDesa dilaksanakan dengan mengundang perwakilan kelompok penyandang disabilitas |  |  |  |
|  | Apakah penetapan APBDesa dilaksanakan dengan mengundang perwakilan masyarakat miskin |  |  |  |
|  | Apakah penandatanganan peraturan desa tentang APBDesa dilakukan dihadapan publik |  |  |  |
|  | Apakah APBDesa yang telah ditetapkan diperlihatkan kewarga secara terbuka di tempat umum |  |  |  |
|  | Apakah APBDesa dipasang dalam website desa |  |  |  |
|  | Apabila warga ingin bertanya tentang APBDesa, diberitahukan cara dan nomor kontak perangkat desa yang bertanggungjawabnya |  |  |  |

**Kelompok tokoh agama/tokoh masyarakat/kelompok warga yang selalu terlibat dalam proses di desa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Komponen** | **Kesesuaian** | **Keterangan**  |
| **Ya** | **Tidak** |
| **PROSES PENYUSUNAN APBDesa** |
|  | Apakah Saudara tahu jadwal penyusunan APBDesa oleh perangkat desa |  |  |  |
| **Musdes RAPBDesa** |
|  | Apakah Saudara tahu ada musdes RAPBDesa yang dilaksanakan oleh BPD |  |  |  |
|  | Apakah Saudara diundang dalam musdes RAPBDesa |  |  |  |
| **Pembahasan dan Persetujuan**  |
|  | Apakah Saudara diundang dalam pembahasan RAPBDesa |  |  |  |
|  | Apakah Saudara mengetahui ada pembahasan terkait program atau kegiatan untuk **perempuan** |  |  | Apa yang dibahas |
|  | Apakah Saudara mengetahui ada pembahasan terkait program atau kegiatan untuk **penyandang disabilitas** |  |  | Apa yang dibahas |
|  | Apakah Saudara mengetahui ada pembahasan terkait program atau kegiatan untuk **masyarakat miskin** |  |  | Apa yang dibahas |
|  | Apakah mengundang kelompok masyarakat lain (perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin) |  |  |  |
| **Evaluasi APBDesa** |
|  | Apakah Saudara mengetahui ada evaluasi APBDesa oleh Bupati |  |  |  |
| **PENETAPAN APBDesa** |
|  | Apakah ada perwakilan warga yang diundang dalam penetapan APBDesa |  |  |  |
|  | Apakah APBDesa yang telah ditetapkan diperlihatkan kewarga secara terbuka di tempat umum |  |  |  |
|  | Apakah APBDesa dipasang dalam website desa |  |  |  |
|  | Apabila warga ingin bertanya tentang APBDesa, diberitahukan cara dan nomor kontak perangkat desa yang bertanggungjawabnya |  |  |  |

**Kelompok Marginal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Komponen** | **Kesesuaian** | **Keterangan**  |
| **Ya** | **Tidak** |
| **PROSES PENYUSUNAN APBDesa** |
|  | Apakah Saudara tahu ada penyusunan APBDesa |  |  |  |
| **Musdes RAPBDesa** |
|  | Apakah Saudara tahu ada musdes RAPBDesa yang dilaksanakan oleh BPD |  |  |  |
| **Pembahasan dan Persetujuan**  |
|  | Apakah Saudara pernah mendengar adanya pembahasan APBDesa |  |  |  |
| **PENETAPAN APBDesa** |
|  | Apakah Saudara diundang dalam penetapan APBDesa |  |  |  |
|  | Apakah Saudara mengetahui APBDesa yang telah ditetapkan diperlihatkan ke warga secara terbuka di tempat umum |  |  |  |
|  | Apabila Saudara pernah bertanya tentang program/kegiatan untuk perempuan/penyandang disabilitas/masyarakat miskin kepada perangkat desa |  |  |  |

* 1. **STRUKTUR/DOKUMEN PEGANGGARAN DESA**
	2. **PENDAPATAN**

Adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pada dasarnya pendapatan ada 3 macam:

***Pendapatan Asli Desa***

* + - * Hasil Usaha Swadaya,
			* Hasil Aset Desa (tambatan perahu, pasar desa, tanah milik desa, pemandian umum,
			* Partisipasi dan Gotong Royong
			* Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah (Pungutan Desa, Pendapatan bunga, Penjualan penghapusan barang milik desa)

***Pendapatan Transfer***

* Dana Desa (dari pemerintah pusat / APBN)
* Bagi hasil pajak Daerah dan retribusi daerah (Kabupaten/Kota)
* Alokasi dana desa (ADD)
* Bantuan keuangan dari APBD propinsi
* Bantuan keuangan APBD kabupaten/Kota

***Pendapatan lain***

* Hasil Kerjasama dengan Pihak ketiga
* Bantuan Perusahaan yang berlokasi di desa
* Hadiah perlombaan
* Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keu. Desa
* Hasil pengelolaan tanah kas desa

|  |
| --- |
| Apa yang perlu dicermati dalam dokumen pendapatan:1. Pastikan tidak ada pendapatan yang tidak tercatat
2. Pastikan bahwa perempuan , penyandang disabilitas dan masyarakt miskin memiliki kemampuan mencermati pendapatan desa agar seluruh pendapatan desa tertulis dalam APBdesa dan masuk dalam rekening desa
3. Memastikan rumus pendapatan transfer sesuai dengan aturan yang ada.
 |

Format PENDAPATAN DESA menurut Permendagri 113 tahun 2014

| **KODE****REKENING** | **URAIAN** |
| --- | --- |
| **1** |  |  |  | **PENDAPATAN** |
| 1 | 1 |  |  | *Pendapatan Asli Desa* |
| 1 | 1 | 1 |  | Hasil Usaha |
| 1 | 1 | 2 |  | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
| 1 | 1 | 3 |  | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | *Pendapatan Desa* |
| 1 | 2 | 1 |  | Dana Desa |
| 1 | 2 | 2 |  | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota |
| 1 | 2 | 3 |  | Alokasi Dana Desa |
| 1 | 2 | 4 |  | Bantuan Keuangan |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 3 |  |  | *Pendapatan lain-lain* |
| 1 | 3 | 1 |  | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat |
| 1 | 3 | 2 |  | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **JUMLAH PENDAPATAN** |

Checklist menelusur dokumen pendapatan

**Perangkat Desa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pertanyaan | ya | tidak | keterangan |
| 1 | Apakah pendapatan desa dikabarkan kepada seluruh warga secara detail |  |  |  |
| 2 | Apakah pendapatan asli desa (PADes) lebih tinggi daripada Dana Desa |  |  |  |
| 3 | Apakah pendapatan asli desa (PADes) lebih tinggi daripada alokasi dana desa |  |  |  |
| 4 | Apakah pendapatan asli desa (PADes) lebih tinggi daripada dana bantuan kabupaten  |  |  |  |
|  | Apakah rumus dana transfer sudah sesuai |  |  |  |
|  | Apakah ada sumber pendapatan yang belum masuk dalam APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**BPD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pertanyaan | ya | tidak | keterangan |
| 1 | Apakah BPD mengecek kebenaran sumber sumber pendapatan desa yang tercantum dalam APBdesa |  |  |  |
| 2 | Apakah BPD memastikan rumus sumber pendapatan desa (pendapatan transfer) sudah sesuai atau belum. |  |  |  |
| 2 | Apakah BPD melakukan teguran atau usulan apabila pengecekan berbeda |  |  |  |

Kelompok tokoh agama/tokoh masyarakat/kelompok warga yang selalu terlibat dalam proses di desa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pertanyaan | ya | tidak | keterangan |
| 1 | Apakah mengetahui sumber pendapatan desa |  |  |  |
| 2 | Apakah saudara tahu dokumen APBdesa |  |  |  |
| 3 | Apakah Saudara tahu/pernah melihat dokumen pendapatan desa yang ada dalam APBdes |  |  |  |
| 4 | Apakah Saudara pernah mendiskusikan dokumen pendapatan desa dengan warga lain atau pemerintah desa |  |  |  |
| 5 | Apakah Saudara pernah meminjam dokumen pendapatan desa |  |  |  |
| 6  | Apakah Saudara pernah dilarang untuk mengetahui pendapatan desa |  |  |  |

Kelompok Marginal

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pertanyaan | ya | tidak | keterangan |
| 1 | Apakah Saudara tahu sumber sumber pendapatan desa |  |  |  |
| 2 | Apakah Saudara terlibat atau dilibatkan atau mengajukan diri dalam penyusunan pendapatan desa |  |  |  |

* 1. **BELANJA**

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan dieroleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

* **Belanja Desa meliputi:**
* Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
* Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa;
* Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
* Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa;
* Belanja Tak Terduga
* Masing-masing kelompok belanja dibagi dalam kegiatan. Kegiatan yang tercantum dalam APBdesa sesuai dengan perencanaan yang ada dalam RKPDesa.
* Masing-masing kegiatan terdiri dari jenis belanja : belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal
	1. **Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Merupakan kelompok belanja terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Belanja ini berisi penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan perangkat desa, operasional perkantoran, operasional BPD, operasional pedukuhan, operasional RT/RW dan urusan pemerintahan lainnya.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** |  |  |  | **BELANJA** |
| 2 | 1 |  |  | *Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* |
| 2 | 1 | 1 |  | Penghasilan Tetap dan Tunjangan |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: |
|  |  |  |  | * Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
 |
|  |  |  |  | * Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
 |
|  |  |  |  | * Tunjangan BPD
 |
| 2 | 1 | 2 |  | Operasional Perkantoran |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |
|  |  |  |  | * + Alat Tulis Kantor
 |
|  |  |  |  | * + Benda POS
 |
|  |  |  |  | * + Pakaian Dinas dfan Atribut
 |
|  |  |  |  | * + Pakaian Dinas
 |
|  |  |  |  | * + Alat dan Bahan Kebersihan
 |
|  |  |  |  | * + Perjalanan Dinas
 |
|  |  |  |  | * + Pemeliharaan
 |
|  |  |  |  | * + Air, Listrik,dasn Telepon
 |
|  |  |  |  | * + Honor
 |
|  |  |  |  | * + dst…………………..
 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal |
|  |  |  |  | * + Komputer
 |
|  |  |  |  | * + Meja dan Kursi
 |
|  |  |  |  | * + Mesin TIK
 |
|  |  |  |  | * + dst……………………..
 |
| 2 | 1 | 3 |  | Operasional BPD |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |
|  |  |  |  | * + ATK
 |
|  |  |  |  | * + Penggadaan
 |
|  |  |  |  | * + Konsumsi Rapat
 |
|  |  |  |  | * + dst ………………………….
 |
| 2 | 1 | 4 |  | Operasional RT/ RW |
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |
|  |  |  |  | * + ATK
 |
|  |  |  |  | * + Penggadaan
 |
|  |  |  |  | * + Konsumsi Rapat
 |
|  |  |  |  | * + dst ………………………….
 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Apa yang perlu dicermati dari belanja penyelenggaraan pemerintahan:* + - * 1. Pastikan belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan tidak lebih tinggi dari belanja pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
				2. Lihat dan cermati alokasi anggaran untuk para perangkat desa, kepala dukuh, RT/RW maupun BPD.

Atas dasar gaji inilah, maka perangkat desa berkewajiban melayani warganya |

* 1. **Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Seringkali disebut belanja pembangunan atau belanja fisik. Belanja ini menyedot anggaran paling besar dibanding belanja bidang lainnya. Bidang ini cenderung dianggap bidang yang maskulin atau lebih banyak terkait dengan kelompok laki-laki. Jangan salah, kelompok perempuan dan kelompok penyandang disabilitas juga perlu memerhatikan belanja pembangunan.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 |  |  | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| 2 | 2 | 1 |  | Perbaikan Saluran Irigasi |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan jasa |
|  |  |  |  | * + Upah Kerja
 |
|  |  |  |  | * + Honor
 |
|  |  |  |  | * + dst………………..
 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal |
|  |  |  |  | * + Semen
 |
|  |  |  |  | * + Material
 |
|  |  |  |  | * + dst…………
 |
|  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 2 |  | Pengaspalan jalan desa  |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa : |
|  |  |  |  | * Upah Kerja
 |
|  |  |  |  | * Honor
 |
|  |  |  |  | * dst…………………………………..
 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal: |
|  |  |  |  | * Aspal
 |
|  |  |  |  | * Pasir
 |
|  |  |  |  | * dst ……………
 |
|  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 3 |  | Kegiatan…………………………… |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Apa yang harus dicermati dalam belanja pembangunan:1. pastikan belanja ini sudah termasuk pembangunan untuk jalur khusus bagi penyandang disabilitas dan lansia
2. pastikan belanja pembangunan ini menggunakan tenaga kerja lokal
 |

* 1. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

Belanja ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kelompok kelompok masyarakat termasuk kelompok marginal. Peningkatan pengetahuan kelompok ini berdasarkan kebutuhan kelompok, bukan kegiatan yang mencontoh kegiatan tahun sebelumnya.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **3** |  |  | **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**  |
| 2 | 3 | 1 |  | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
|  |  |  |  | * Honor Pelatih
 |
|  |  |  |  | * Konsumsi
 |
|  |  |  |  | * Bahan Pelatihan
 |
|  |  |  |  | * dst…………………
 |
|  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 2 |  | Kegiatan Pembinaan penyandang Disabilitas |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Yang perlu dicermati dalam belanja bidang kemasyarakatan:1. pastikan seluruh kelompok yang ada di desa terfasilitasi kegiatannya.
2. Apabila kelompok penyandang disabilitas atau kelompok marginal lainnya belum terbentuk, pastikan bahwa kelompok-kelompok ini mulai difasilitasi oleh desa dengan program khusus pembinaan
 |

* 1. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Kegiatan untuk mendorong pemberdayaan ada dalam kewenangan pemberdayaan desa ini.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **4** |  |  | **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**  |
| 2 | 4 | 1 |  | Kegiatan pengelolaan sampah organik dan an-organik |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
|  |  |  |  | * Honor pelatih
 |
|  |  |  |  | * Konsumsi
 |
|  |  |  |  | * Bahan pelatihan
 |
|  |  |  |  | * dst…………………
 |
|  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 2 |  | Kegiatan……………………….. |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Yang perlu dicermati dalam belanja Bidang pemberdayaan masyarakat:1. pastikan usulan-usulan pemberdayaan untuk kelompok peremuan, penyandang disabilitas dan masyarakat miskin masuk dalam kegiatan yang didanai disini.
2. Mencermati lebih jauh, belanja di bidang pemberdayaan masyarakat menjangkau sampai ke wilayah desa yang paling pinggir/perbatasan.
3. Pastikan bahwa seluruh kelompok yang perlu mendapatkan pemberdayaan terfasilitasi disini. Misal kelompok penyandang disabilitas anak-anak, penyandang disabilitas remaja dan penyandang disabilitas usia produtif, mendapatkan pelatihan pemberdayaan yang berbeda-beda.
 |

* 1. ***Bidang Tak Terduga***

Fungsi anggaran adalah fungsi stabilisasi. Dalam keadaan darurat atau terdapat kejadian luar biasa, pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum disediakan anggarannya secara pasti. Kejadian luar biasa yang dimaksud adalah keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang baik yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, dll. Keadaan darurat ini ditetapkan oleh Bupati. Diantaranya: kekeringan yang menyebabkan tanaman sawah puso/tidak panen, banjir, dll.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *2* | *5* |  |  | *Bidang Tak Terduga*  |
| 2 | 5 | 1 |  | Kegiatan Kejadian Luar Biasa  |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
|  |  |  |  | * Honor tim
 |
|  |  |  |  | * Konsumsi
 |
|  |  |  |  | * Obat-obatan
* dst……………………
 |
|  |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 2 |  | Kegiatan……………………… |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **JUMLAH BELANJA**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***SURPLUS / DEFISIT*** |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Pastikan dalam pos belanja tak terduga:Bisa digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan mendesak bagi perempuan, anak dan lansia serta penyandang disabilitas selama masa awal atas risiko bencana yang dipastikan di wilayah itu. |

**Checklist MENELUSUR DOKUMEN PENGANGGARAN**

Informan :

Desa :

Tanggal Pengisian :

**PERANGKAT DESA**

|  |
| --- |
| **INFORMASI UMUM** |
|  | Apakah Desa menyiapkan dokumen APBDesa untuk bisa diakses masyarakat  |  |  |  |
|  | Apakah Desa memberitahukan kontak yang bisa dihubungi untuk bertanya tentang APBDesa  |  |  |  |
|  | Apakah Ringkasan dokumen APBDesa dibuka kepada masyarakat  |  |  |  |
| **PENDAPATAN** |
|  | Apakah pendapatan desa dikabarkan kepada seluruh warga secara detail |  |  |  |
|  | Apakah pendapatan asli desa (PADes) tidak menyasar pemungutannya dari pedagang kecil  |  |  |  |
|  | Apakah seluruh sumber pendapatan desa sudah masuk dalam APBDes |  |  |  |
| **BELANJA** |
|  | Apakah belanja dalam APBDesa sesuai dengan prioritas belanja desa ditetapkan dalam musyawarah desa.  |  |  |  |
|  | Apakah belanja aparatur lebih tinggi daripada belanja pembinaan kemasyarakatan atau pemberdayaan |  |  |  |
|  | Apakah belanja pembangunan lebih tinggi daripada belanja pembinaan kemasyarakatan |  |  |  |
|  | Apakah ada Insentif dan /transportasi untuk **Kader POSYANDU** dicantumkan dalam APBDesa. |  |  |  |
|  | Apakah ada Insentif dan /transportasi untuk **Pendamping penyandang disabilitas** dicantumkan dalam APBDesa. |  |  |  |
|  | Apakah ada insentif untuk lembaga kemasyarakatan desa lain yang melakukan kegiatan pembangunan, pelayanan atau pemberdayaan masyarakat di desa. |  |  |  |
|  | Apakah belanja **pembinaan kemasyarakatan** lebih rendah daripada belanja **pemberdayaan masyarakat** |  |  |  |
|  | Apakah belanja pemberdayaan masyarakatan ada yang digunakan untuk **penyandang disabilitas** |  |  |  |
|  | Apakah belanja pemberdayaan masyarakatan ada yang digunakan untuk **masyarakat miskin** |  |  |  |
|  | Apakah belanja pemberdayaan masyarakatan ada yang digunakan untuk **perempuan**  |  |  |  |
| **PEMBIAYAAN** |
|  | Apakah pembiayaan –misalnya penyertaan modal, pinjaman dll- berdasar pada Peraturan Desa |  |  |  |
|  | Apakah ada penyertaan modal untuk usaha yang dikelola oleh **perempuan**  |  |  |  |
|  | Apakah ada penyertaan modal untuk usaha yang dikelola oleh **penyandang disabilitas** |  |  |  |
|  | Apakah ada penyertaan modal untuk usaha yang dikelola oleh **masyarakat miskin** |  |  |  |

**PANDUAN ANALISIS:**

* Jawaban **‘Ya’**: ……. Jawaban **‘tidak’**: ……
* Jika jawaban ya diatas 75% maka APBDesa peka/responsive
* Jika jawaban ya dan tidak 50 % maka APBdesa tidak peka / tidak responsive
* Jika jawaban ya kurang dari 25% maka APBdesa sangat tidak responsive
1. **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan antinya penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pos ini bisa digunakan oleh desa untuk usaha desa. Perlu dipastikan usaha desa terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** |  |  |  | **PEMBIAYAAN**  |
| *3* | *1* |  |  | *Penerimaan Pembiayaan*  |
| 3 | 1 | 1 |  | SILPA  |
| 3 | 1 | 2 |  | Pencairan Dana Cadangan  |
| 3 | 1 | 3 |  | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan  |
|  |  |  |  | JUMLAH ( RP ) |
|  |  |  |  |  |
| *3* | *2* |  |  | *Pengeluaran Pembiayaan*  |
| 3 | 2 | 1 |  | Pembentukan Dana Cadangan  |
| 3 | 2 | 2 |  | Penyertaan Modal Desa  |
|  |  |  |  | JUMLAH ( RP ) |
|  |  |  |  |  |